

RINGKASAN

LINTANG ARIO PAMBUDI, Program Studi Magister Hukum-Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Analisis Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Pengembalian Dana Anggota Koperasi Simpan Pinjam, Komisi Pembimbing, Pembimbing I: Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D., Pembimbing II: Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah prosedur hukum atau upaya hukum yang memberikan hak kepada setiap Debitur untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren apabila Debitur tersebut tidak dapat atau diperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan PKPU tersebut dengan maksud Perjanjian harus disetujui oleh para Kreditor Konkuren dengan melakukan pemungutan suara dalam rapat Kreditor dan untuk beberapa kriteria juga harus dihomologasi oleh pengadilan Niaga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akibat hukum bagi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta jika tidak melaksanakan isi Akta Perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan untuk menganalisa pertanggungjawaban hukum pengurus bila harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) pada putusan No. 66/pdt.sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst dan pendekatan undang-undang (*Statute approach*). Tipe Penelitian ini adalah preskriptif, dengan menggunakan sumber data yang berasal dari data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Data-data yang terkumpul dianalisis secara normatif kualitatif menggunakan metode deduktif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akibat Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta jika melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi, maka hutang yang jatuh tempo akan diambil alih oleh PT Sun Internasional Capital sebagai *Corporate Guarantor* dengan instrumen Surat Hutang, setelah harta benda Debitur utama yaitu Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta telah dilelang, tetapi hasilnya tidak mencukupi membayar hutangnya. Para Kreditur juga dapat mengajukan pembatalan, ganti rugi, pemenuhan prestasi. Ketika diajukan pembatalan dan dikabulkan oleh hakim maka Koperasi dinyatakan pailit dan tidak dapat mengajukan perdamaian lagi. Pertanggungjawaban pengurus dalam hal suatu kerugian terjadi karena kelalaian atau kesengajaan maka kerugian yang ditanggung sendiri oleh masing-masing pengurus di mana kerugian itu tidak dibebankan kepada semua anggota pengurus, dalam kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, terdapat pengurus yang diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan Koperasi mengalami kerugian maka jika terbukti melakukan tindak pidana dan tindakan tersebut merugikan koperasi, harta kekayaan pengurus yang melakukan tindakan merugikan koperasi dapat digunakan untuk melunasi hutang koperasi. Selain pertanggungjawaban secara perdata pengurus juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika terbukti memenuhi unsur-unsur yang ada.

SUMMARY

LINTANG ARIO PAMBUDI, Master of Law Study Program-Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Analysis of Homologation in Postponement of Debt Payment Obligations As an Effort to Refund Members of Savings and Loans Cooperatives, Supervisor I: Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D., Supervisor II: Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal procedure or legal remedy that gives each Debtor the right to submit a peace plan which includes an offer to pay all or part of the debt to concurrent creditors if the debtor cannot or it is estimated that debtor will not be able to continue to pay the debts that are due and billable. The PKPU submission with the intention of the agreement must be approved by the Concurrent Creditors by voting in the Creditors' meeting and for some criteria it must also be homologated by the Commercial Court.

This study aims to analyse the legal consequences for the Indosurya Cipta Savings and Loan Cooperative if it does not carry out the contents of the Peace Deed which has been homologated by the Central Jakarta Commercial Court and to analyse the legal accountability of the management if the assets of the Indosurya Cipta Savings and Loan Cooperative are insufficient to pay off their debts.

This research was conducted with a case approach (Case Approach) on decision No. 66 / pdt.sus-PKPU / 2020 / PN Niaga Jkt.Pst and the statute approach. This type of research is prescriptive, using data sources derived from secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method was carried out by means of literature study with the data presentation technique presented in the form of systematic descriptions. The collected data were analyzed normatively qualitatively using the deductive method

The results showed that due to the Indosurya Cipta Savings and Loan Cooperative if it defaults in the Homologated Peace Agreement, the debt that is due will be taken over by PT Sun Internasional Capital as a Corporate Guarantor with a Bond instrument, after the main debtor's property is the Savings and Loan Cooperative. Indosurya Cipta has been auctioned, but the proceeds are not sufficient

to pay the debt. Creditors can also apply for cancellations, compensation, fulfillment of achievements. When a cancellation is submitted and the judge agrees, the cooperative is declared bankrupt and cannot file for peace again. The responsibility of the management in the event that a loss occurs due to negligence or deliberately, the loss is borne by each management where the loss is not borne by all members of the management, in the case of default of the Indosurya Cipta Savings and Loan Cooperative, there is a manager who is suspected of committing a criminal offense. causing the cooperative to suffer losses, if proven to have committed a criminal act and the action was detrimental to the cooperative, the assets of the management who committed an act detrimental to the cooperative can be used to pay off the cooperative's debt. In addition to civil accountability, the management can also be criminally responsible if it is proven that they fulfill the existing elements.

